

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/ Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 1 dan 7

# Baru Terealisasi 17,5 Persen, Pajak Restoran Digenjot

**SEMARANG** - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sektor pajak kini terus digenjot oleh Pemkot Semarang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Yudi Mardiana mengatakan, jika beberapa sektor pajak memang saat ini belum teroptimalkan dengan baik. Seperti halnya pajak restoran. Diakuinya, pendapatan daerah dari sektor pajak tersebut memang kondisinya selalu naik turun. "Ya, karena pendapatan restoran sendiri juga tidak sama terus setiap bulannya," ujar Yudi, Senin (11/3).

Data Bapenda Kota Semarang, realisasi untuk sektor pajak tersebut saat ini baru mencapai 17,5 persen. Seharusnya, menurut perhitungan Bapenda Kota Semarang, realisasi hingga Maret 2019 ini sudah mampu mencapai 22 persen dari target. "Memang di tri wulan ini sektor pajak restoran realisasinya kurang sedikit dari target per tri wulan," katanya. ▶ Baca *Baru* ... hal 7



*Sambungan dari hal.1*

Menurunnya pendapatan daerah di tri wulan pertama dari sektor pajak restoran disebabkan faktor waktu. Dikatakannya, pendapatan restoran setiap bulan memang berbeda. "Ada pasang dan surutnya, itu yang menjadi pengaruh terhadap pendapatan dari sektor pajak itu," ujarnya.

Ia mencontohkan pendapatan daerah dari sektor pajak restoran saat hari-hari tertentu selalu me-

ningkat.

Seperti halnya saat hari libur dan hari besar tertentu. Seperti Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Pendapatan daerah dari sektor pajak restoran dipastikan meningkat drastis. Hal itu disebabkan meningkatnya pula pendapatan restoran itu sendiri. "Karena kita *ngitungnya* jika secara matematika itu 100 dibagi 12, tetapi terkadang ada bulan tertentu memang kurang. Restoran itu misalnya bulan puasa pemasukan mereka

kurang, dan hari tertentu berkurang," bebernya.

Data Bapenda Kota Semarang, saat ini jumlah Wajib Pajak (WP) restoran mencapai 3.700. Dikatakannya, kesemua WP tersebut sudah terdata. Namun memang beberapa dari mereka masih belum optimal dalam hal pembayaran pajak itu sendiri.

Tentunya itu juga mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor pajak restoran. "Itu mempengaruhi penerimaan pajak kita juga. Dari

sektor pajak restoran. Jadi, ada variasi masing-masing hari. Jumlah wajib pajak restoran banyak cuma memang belum optimal," tuturnya.

Kendala lain yaitu beberapa wajib pajak dalam pembayaran juga seering terlambat. Hal itu yang saat ini dipikirkan oleh Pemkot Semarang dalam hal ini Bapenda Kota Semarang supaya dapat menggenjot pendapatan dari sektor pajak tersebut.

"Karena pembayaran juga ada

yang telat. Jadi, kita akan mengoptimalkan dulu yang besar-besar ini. Selain pajak restoran tentunya," katanya.

Sektor pajak lain yang saat ini jadi perhatian Bapenda Kota Semarang yaitu pajak air tanah.

Dikatakan, untuk WP air tanah sudah mencapai 400. Jumlah tersebut, lanjutnya, bisa berbeda dengan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, dari hasil penelu-

suran yang dilakukan oleh Bapenda Kota Semarang, masih banyak WP air tanah yang belum melakukan pelaporan.

"Saat ini, baru 400 wajib pajak. Itu pun mereka baru mau bayar setelah kita lakukan penelusuran, padahal fakta di lapangan lebih dari itu," katanya. Hal tersebutlah yang membuat realisasi pajak air tanah di 2018 lalu jauh dari target.

Penerimaan pajak air tanah pa-

da 2018 lalu tidak mencapai target yang ditentukan yaitu Rp 9 miliar. Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah tercapai Rp 8,858 miliar atau 98,43 persen. "Realisasinya itu baru 98,43 persen. Di 2019 ini akan kita kejar dan kita optimalkan agar mencapai target," ujarnya.

Karenanya, Bapenda Kota Semarang terus mengupayakan realisasi pajak dari dua sektor tersebut di 2019 ini. (ewb/aro)